

Strategi Gerilya Pangeran Diponegoro Dalam Melawan Kolonialisme Belanda (1825-1830) Dari Perspektif Perang Generasi Kedua

Tri Agung Ari Pamungkas¹ Mitro Prihantono² Marsono³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: triagungaripamungkas@gmail.com¹ mitro.prihantoro@idu.ac.id²
marsonopsk@yahoo.co.id³

Abstrak

Perang Diponegoro (1825–1830) merupakan salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah Indonesia yang menandai benturan antara kekuatan tradisional lokal dengan modernisasi militer kolonial. Konflik ini dipicu oleh intervensi administratif Belanda terhadap hak agraria serta pelecehan ruang sakral di Tegalrejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilihan strategi gerilya, mengkaji karakteristik strategi tersebut melalui perspektif teori perang generasi kedua (Second Generation Warfare), serta menelaah relevansinya terhadap penguatan konsep pertahanan rakyat semesta di Indonesia masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap arsip kolonial dan studi pustaka, dengan analisis data menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi gerilya Diponegoro berhasil mengeksploitasi kelemahan militer Belanda yang berbasis doktrin perang generasi kedua yang kaku dan mengandalkan struktur komando linier. Diponegoro mengintegrasikan dukungan populasi sebagai pusat gravitasi (center of gravity), di mana rakyat menyediakan logistik dan informasi. Penggunaan medan geografis Jawa serta legitimasi ideologis jihad menjadi kunci daya tahan perlawanan. Belanda merespons melalui strategi Benteng Stelsel untuk mengisolasi gerilyawan dari masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa strategi Diponegoro merupakan prototipe perang rakyat semesta yang memadukan aspek militer, sosial, dan moral, sehingga tetap relevan sebagai rujukan dalam pengembangan doktrin pertahanan nasional yang adaptif terhadap ancaman asimetris modern.

Kata Kunci: Strategi Gerilya, Perang Diponegoro, Perang Generasi Kedua, Pertahanan Rakyat Semesta, Kolonialisme Belanda

Abstract

The Diponegoro War (1825–1830) was one of the largest resistances in Indonesian history, marking the clash between traditional local forces and colonial military modernization. The conflict was triggered by Dutch administrative intervention in land rights and the desecration of sacred spaces in Tegalrejo. This study aims to analyze the factors behind the choice of guerrilla strategy, examine its characteristics through the perspective of second-generation warfare theory, and analyze its relevance to strengthening the concept of total people's defense in modern Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through documentation studies of colonial archives and literature studies, with data analysis using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The results show that Diponegoro's guerrilla strategy successfully exploited the weaknesses of the Dutch military, which relied on a rigid second-generation warfare doctrine and linear command structures. Diponegoro integrated population support as the center of gravity, where the people provided logistics and information. The utilization of Java's geographical terrain and ideological jihad legitimacy were key to the resistance's endurance. The Dutch responded through the Benteng Stelsel strategy to isolate guerrillas from the community. The study concludes that Diponegoro's strategy is a prototype of total people's warfare that combines military, social, and moral aspects, thus remaining relevant as a reference in developing a national defense doctrine that is adaptive to modern asymmetric threats.

Keywords: Guerrilla Strategy, Diponegoro War, Second Generation Warfare, Total People's Defense, Dutch Colonialism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perang Diponegoro (1825–1830) merupakan salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah Indonesia yang menandai konflik panjang antara kekuatan pribumi dan kolonial Belanda. Latar belakang utama perang ini dipicu oleh persoalan sosial, ekonomi, dan politik, seperti intervensi kolonial terhadap hak-hak agraria, tekanan pajak, serta dominasi budaya Barat yang dianggap mengancam nilai-nilai lokal Jawa (Isnaeniah et al., 2024). Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan dengan mengedepankan mobilisasi rakyat Jawa, sehingga perang ini menjadi perang rakyat semesta dengan melibatkan petani, bangsawan, hingga ulama. Dinamika perang berlangsung secara intens dengan taktik gerilya, penyerangan mendadak, dan pemanfaatan kondisi geografis Jawa untuk melemahkan kekuatan militer Belanda. Dari perspektif sejarah, perang ini tidak hanya menampilkan semangat nasionalisme awal, tetapi juga menggambarkan benturan antara kekuatan tradisional lokal dengan modernisasi militer kolonial yang sedang berkembang. Dalam konteks teori perang modern, Perang Diponegoro dapat dipahami melalui lensa Perang Generasi Kedua (*Second Generation Warfare*). Konsep ini merujuk pada doktrin militer yang berkembang setelah Perang Dunia I, menekankan pada penggunaan artileri, disiplin pasukan, serta strategi *attrition warfare* atau perang habis-habisan yang berfokus pada kekuatan tembakan (*firepower*) dan pertahanan terstruktur (Lind, 2021). Meskipun konteks waktu Perang Diponegoro lebih awal, pola-pola peperangan yang muncul mencerminkan ciri-ciri generasi kedua, khususnya dari pihak Belanda yang mengandalkan kekuatan artileri, benteng, serta disiplin militer Eropa. Belanda berupaya mengatasi taktik gerilya Diponegoro dengan membangun jaringan benteng (*fort Stelsel*), yang pada dasarnya merupakan adaptasi taktik pertahanan teritorial yang menekankan kontrol spasial dan pemadatan kekuatan (Ariwibowo, 2021). Sementara itu, pihak Diponegoro justru menunjukkan adaptasi terhadap konsep perang asimetris yang lebih *fleksibel*, sehingga perang ini memperlihatkan interaksi unik antara strategi konvensional generasi kedua dengan taktik *irreguler* lokal.

Pada awal abad ke-19, setelah melewati masa kekacauan akibat Perang Napoleon dan pendudukan Inggris (1811-1816), Belanda kembali mengokohkan kendali atas Hindia Belanda dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi kerajaan. Namun, kebijakan kolonial mereka yang semakin agresif dan sentralistik menyebabkan pertentangan signifikan di Jawa, khususnya dengan masyarakat di Kesultanan Yogyakarta. Belanda menerapkan sistem pemerintahan ganda di mana pejabat pribumi, khususnya bangsawan Mataram, diintegrasikan ke dalam hierarki kolonial untuk menjadi perpanjangan tangan administrasi Belanda (Isnaeniah et al., 2024). Sistem ini sebenarnya mengikis kedaulatan penguasa tradisional dan menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan elit serta rakyat bawah. Pada dekade 1820-an, Belanda memperluas intervensi langsung ke wilayah kesultanan melalui pembangunan jalan, penanaman patok, dan pengenaan pajak berat serta kerja paksa (*corvée*), yang memicu keresahan sosial luas (Zahro et al., 2021). Salah satu pemicunya terjadi di Tegalrejo, dimana pembangunan jalan Magelang–Yogyakarta memotong areal makam leluhur Pangeran Diponegoro. Bagi Diponegoro, tindakan ini bukan sekadar pengerjaan infrastruktur, melainkan penghinaan terhadap nilai spiritual dan simbol kultural yang sangat sakral. Konflik ini mencerminkan bagaimana ekspansi fisik kolonial melewati batas-batas simbolik dan tradisional masyarakat Jawa, sehingga memperdalam segregasi dan menyulut pemberontakan.

Semua aspek ini, kontrol administratif dan militer Belanda, pembangunan infrastruktur atas lahan suci, kerja paksa, serta sistem monopoli hasil bumi, telah membentuk sebuah tatanan

kolonial agresif yang tandas memicu sentimen anti-Belanda dan menyiapkan panggung bagi Perang Jawa 1825-1830. Konflik berskala besar ini bukan sekadar reaksi terhadap tindakan tertentu, melainkan puncak resensi panjang terhadap struktur kolonial yang merusak tatanan kultural, spiritual, dan ekonomis masyarakat Jawa. Sebagai gerakan perlawanan yang sangat masif, Perang Jawa tersebut mencatat sekitar 200 ribu korban jiwa, memperlihatkan betapa dalam dan mendasarnya ketegangan antara kolonialis dan masyarakat lokal. (Hanik & Tatik, 2013) Pemicu langsung meletusnya Perang Jawa (1825–1830) adalah insiden di Tegalrejo, di mana kebijakan pembangunan jalan oleh pemerintah Hindia Belanda secara tidak sensitif melintasi area makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pada pertengahan Juni 1825, Residen Belanda Smissaert memutuskan untuk membelokkan rencana jalan Magelang-Yogyakarta agar melewati Muntilan, kemudian menerobos Tegalrejo, tanpa pemberitahuan ke pihak keraton atau keluarga Diponegoro (Perpustakaan Tanah Impian, 2012). (Sari, 2023) Pada 20 Juli 1825, upaya penangkapan Diponegoro di Tegalrejo yang dipimpin oleh pasukan Belanda dan perangkat Kraton gagal dan berakhir dengan bentrokan bersenjata; rumah dan desa Tegalrejo dibakar oleh Belanda, sehingga konflik eskalatif memburu menjadi perang terbuka. Insiden tersebut menjadi titik balik, di mana perlawanan awal yang bersifat simbolik berubah menjadi pemberontakan masif: rakyat petani hingga bangsawan terpanggil untuk bergabung di bawah panji “Sabil”, atau jihad melawan penjajah. Dengan demikian, insiden Tegalrejo bukan sekadar perselisihan lokal, tetapi katalis utama yang menyatukan elemen masyarakat Jawa dalam pemberontakan berskala luas.

Pemasangan patok-patok penanda ini menyulut kemarahan tidak hanya karena melanggar norma adat dan keagamaan, tetapi juga dianggap tindakan penghinaan serius terhadap otoritas dan kesakralan keluarga Diponegoro. Mendapati tindakan ini, Diponegoro memerintahkan pasukannya, yang terdiri dari rakyat desa dan priyayi, untuk mencabut patok tersebut dan menggantinya dengan tombak, sebagai simbol deklarasi perang dan penolakan terbuka terhadap intervensi Belanda. (Shafira, 2022) Setelah melarikan diri dari insiden Tegalrejo, Pangeran Diponegoro segera menerapkan metode militer gerilya sebagai tulang punggung strategi perjuangannya. Ia mendirikan markas utama di Gua Selarong, sebuah lokasi terpencil yang mudah dipertahankan taktik pintar yang memanfaatkan medan dan pengetahuan local. Dari gua ini, Diponegoro dan pemimpin spiritual seperti Kyai Mojo serta komandan militer Sentot Ali Baharsyah melakukan serangan mendadak, sabotase jalur suplai Belanda, serta memutus komunikasi musuh sebuah penerapan klasik gerakan gerilya yang menekankan mobilitas tinggi dan operasi malam. Pasukan gerilya tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat: petani, priyayi, bahkan bandit yang direkrut sebagai pejuang, menunjukkan mobilisasi sosial yang luas berdasarkan semangat “rakyat semesta”. Metode ini menyerupai teori Sun-Tzu; “gesit seperti angin, sulit dikenal” karakteristik perang generasi kedua yang menolak pertempuran langsung dan penuh atrisi. Hasilnya, Belanda kerap gagal menembus basis ini hingga mereka mengadopsi “Benteng *Stelsel*” pada 1827 dan membangun jaringan benteng dan pasukan bantuan dari daerah lain untuk memblokir gerakan gerilya Diponegoro.

Merespons keberhasilan awal strategi gerilya Diponegoro, Belanda mengambil langkah serius dengan menerapkan strategi Benteng *Stelsel* pada tahun 1827 di bawah komando Jenderal De Kock. Strategi ini melibatkan pembangunan ratusan benteng dan pos pertahanan di daerah strategis seperti Semarang, Ambarawa, Muntilan, Kulon Progo, dan Magelang yang diperkirakan mencapai 165 hingga 258 kubu pada puncaknya. Setiap benteng kemudian dihubungkan oleh jalan dan jembatan yang membentuk sistem pengendalian wilayah, mempermudah pasukan Belanda melakukan patroli dan respon cepat terhadap serangan gerilya. Taktik ini dirancang untuk mengikis jaringan komunikasi dan jalur suplai Diponegoro,

sekaligus mempersempit ruang gerak pasukan gerilya secara bertahap dampaknya telah terlihat sejak 1828–1829, ketika sejumlah panglima gerilya ditangkap, basis sosial mulai terpecah, dan perlawanan mulai melemah. Belanda juga mengerahkan pasukan dari luar Jawa, termasuk dari Sumatra dan Sulawesi, serta meningkatkan intensitas operasi ofensif melalui kolom-kolom bergerak yang memaksa musuh ke wilayah lebih terbatas. Kombinasi strategi pertahanan statis (benteng) dan mobilitas pasukan kolonial ini secara perlahan menggeser inisiatif dari pihak Diponegoro, memaksa gerilya berpindah-pindah basis hingga puncaknya pada penangkapan Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1830. Meskipun strategi Belanda berhasil mematahkan perlawanan secara teknis dan militer, hasilnya juga dipertanyakan karena menimbulkan biaya tinggi, penggunaan tenaga kerja paksa, dan korban jiwa yang besar, sebagaimana terlihat dari penerapan selanjutnya dalam Cultivation System setelah perang berakhir.

Fenomena mobilisasi rakyat yang dilakukan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa (1825–1830) memiliki keterkaitan konseptual dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang kemudian menjadi doktrin pertahanan nasional Indonesia. Sishankamrata merupakan sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai komponen pertahanan yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman (Republik Indonesia, 2002). Meskipun konsep tersebut baru diformalkan setelah Indonesia merdeka, praktik yang dilakukan Diponegoro menunjukkan karakteristik serupa, yakni keterlibatan masyarakat secara luas dalam mendukung operasi militer melalui penyediaan logistik, informasi, perlindungan wilayah, serta partisipasi langsung dalam perlawanan bersenjata. Keterlibatan petani, ulama, santri, bangsawan, dan masyarakat desa menciptakan jaringan dukungan yang memungkinkan strategi gerilya bertahan menghadapi tekanan militer Belanda yang lebih unggul secara teknologi dan organisasi.

Dalam perspektif studi pertahanan, pengalaman Perang Diponegoro menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perlawanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer formal, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan kekuatan sosial, budaya, dan moral masyarakat sebagai bagian dari instrumen pertahanan. Prinsip ini sejalan dengan esensi Sishankamrata yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung utama dalam sistem pertahanan nasional. Mobilisasi berbasis identitas keagamaan, solidaritas sosial, dan kepemimpinan karismatik yang dibangun Diponegoro berhasil menciptakan daya tahan (*resilience*) kolektif yang memperkuat legitimasi perjuangan serta memperluas basis dukungan terhadap gerakan perlawanan. Oleh karena itu, strategi gerilya Diponegoro dapat dipandang sebagai salah satu bentuk historis awal dari konsep pertahanan semesta di Indonesia, di mana sinergi antara unsur militer dan rakyat menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman yang berasal dari kekuatan eksternal yang lebih dominan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015; Republik Indonesia, 2002).

Perang Jawa (1825-1830), yang dipimpin Pangeran Diponegoro, sering dianggap sebagai contoh awal perang generasi kedua di Indonesia, di mana penggunaan artileri dan taktik linier masih dikombinasikan dengan strategi gerilya adaptif. Konflik ini tidak hanya soal pertempuran langsung antara dua kekuatan bersenjata, melainkan merupakan benturan antara model peperangan Barat mengandalkan pertahanan tersentralisasi dan kekuatan tembakan masif dengan roda logistik terorganisir dan bentuk perang rakyat semesta yang memanfaatkan mobilitas tinggi, basis dukungan sosial, serta pengetahuan medan lokal. Diponegoro memadukan idealisme religius dengan perekrutan massa di tingkat desa, ulama, hingga priyayi,

menciptakan identitas kolektif yang bertolak dari struktur hierarki kolonial. Pendekatan ini kemudian menjadi cikal bakal teori modern perlawanan rakyat, karena menekankan bahwa kekuatan militer harus didukung jaringan sosial-politik yang kokoh, bukan hanya alat dan struktur komando. Pandangan ini tercermin dalam literatur klasik perang modern, serta ide-ide strategi pertahanan nasional yang kemudian berkembang di Indonesia pasca-kolonial. Dengan demikian, Perang Jawa bukan sekadar perang regional, tetapi *proto-tipikal* perang generasi kedua yang menyerukan transformasi paradigma perang dari dominasi kekuatan senjata ke perpaduan antara aspek militer, sosial, dan moral. Ini menjadikannya contoh relevan bagi studi evolusi strategi nasional dan pertahanan modern, sesuai tema tesis yang menyoroti bagaimana strategi gerilya Diponegoro meletakkan pondasi doktrin perang rakyat semesta generasi kedua.

Berdasarkan situasi tersebut, pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana strategi gerilya Pangeran Diponegoro mampu membentuk pola perlawanan yang efektif terhadap kekuatan kolonial Belanda dalam konteks awal abad ke-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan elemen-elemen kunci dalam strategi gerilya yang diterapkan Diponegoro, serta menilai efektivitasnya dalam bingkai teori perang generasi kedua yang menekankan perpaduan antara kekuatan tempur, mobilisasi rakyat, dan legitimasi sosial-politik. Dengan demikian, penyusunan Tesis dengan judul “Strategi Gerilya Pangeran Diponegoro dalam Melawan Kolonialisme Belanda (1825-1830) dari Perspektif Perang Generasi Kedua” menjadi sangat relevan sebagai upaya akademik untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan gerilya yang berbasis kekuatan lokal dapat menjadi prototipe penting dalam sejarah strategi perlawanan nasional.

Lebih lanjut, Perang Diponegoro juga memberikan gambaran tentang bagaimana peperangan tradisional di Nusantara mengalami transformasi akibat pertemuan dengan teknologi militer kolonial. Dampak perang terhadap masyarakat Jawa sangat luas, mencakup kerugian material, hilangnya nyawa, serta perubahan tatanan sosial akibat kebijakan represif Belanda setelah perang berakhir (Zahro, Subaryana, & Mardikun, 2021). Namun, dari perspektif strategi, perang ini menunjukkan bahwa meskipun Belanda unggul dalam hal teknologi dan konsep Perang Generasi Kedua, strategi rakyat semesta Diponegoro mampu menunda dominasi penuh kolonial selama lima tahun. Hal ini menegaskan bahwa dinamika Perang Diponegoro bukan hanya sekadar perlawanan bersenjata, tetapi juga representasi awal interaksi antara strategi tradisional pribumi dengan konsep modernisasi militer kolonial yang selaras dengan kerangka generasi kedua. Oleh karena itu, studi tentang Perang Diponegoro tidak hanya penting untuk memahami sejarah nasional, tetapi juga relevan dalam kajian strategi perang modern dan transformasi militer di Asia Tenggara.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian strategi pertahanan dan sejarah militer Indonesia, khususnya dalam merumuskan pelajaran strategis dari pengalaman masa lalu yang dapat diaplikasikan pada konteks pertahanan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya pemahaman akademik terhadap karakteristik perang rakyat semesta, dan bagaimana bentuk awalnya telah muncul dalam perlawanan Diponegoro yang memadukan taktik militer dengan narasi spiritual, sosial, dan kultural. Dengan menelaah peristiwa ini dalam perspektif perang generasi kedua, diharapkan tesis ini mampu memperkuat basis konseptual pertahanan nasional yang adaptif terhadap ancaman non-konvensional serta menjembatani antara sejarah perjuangan dan strategi pertahanan modern Indonesia. Rumusan Masalah: Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilihan strategi gerilya oleh Pangeran Diponegoro dalam konteks sosial-politik Jawa awal abad ke-19? Bagaimana karakteristik strategi gerilya Pangeran Diponegoro jika dianalisis melalui teori perang generasi kedua? Bagaimana relevansi strategi gerilya

Pangeran Diponegoro terhadap konsep pertahanan rakyat semesta di Indonesia masa kini? Tujuan Penelitian: Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilihan strategi gerilya oleh Pangeran Diponegoro. Menganalisis karakteristik strategi gerilya Diponegoro dalam bingkai teori perang generasi kedua. Mengkaji relevansi strategi Diponegoro terhadap pembentukan konsep pertahanan rakyat semesta Indonesia.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul "Diponegoro War History in Total War Perspective in Supporting Strategies the National Defense" (Meideri & Prakoso, 2021) menjelaskan bahwa strategi gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830) memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep perang semesta. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro memanfaatkan kondisi geografis, dukungan masyarakat, serta kekuatan simbolik dan religius untuk membentuk pola perlawanan yang menyeluruh terhadap kolonialisme Belanda. Strategi tersebut mencerminkan keterpaduan antara aspek militer dan sipil yang dikerahkan secara terorganisir dalam bentuk perlawanan asimetris berbasis rakyat. Penelitian ini menjadi landasan penting dalam menjelaskan bagaimana strategi tradisional dapat berkontribusi pada konsepsi pertahanan nasional modern, terutama dalam membangun doktrin yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal. Penulis menjadikan penelitian ini sebagai pijakan teoritis karena relevan dengan penguatan konsepsi strategi pertahanan melalui pendekatan historis, serta memberi kontribusi dalam melihat potensi integrasi nilai perjuangan lokal ke dalam kerangka strategi pertahanan nasional kontemporer.

Kemudian Terdapat Penelitian berjudul "Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825–1830" (Dewi et al., 2020) membahas secara mendalam peran Pangeran Diponegoro dalam memimpin perlawanan rakyat Jawa terhadap kolonialisme Belanda, dengan menekankan akar sosial-politik dan strategi militer yang digunakan. Artikel ini menjelaskan bahwa kemerosotan moral dan dominasi Belanda di lingkungan Keraton Yogyakarta memicu kemarahan Diponegoro yang memegang teguh nilai-nilai Islam dan adat Jawa. Dukungan rakyat terhadap Diponegoro dipicu oleh ketidakadilan ekonomi, dominasi budaya Barat, dan hilangnya legitimasi pemimpin keraton. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan Diponegoro bukan hanya pemberontakan militer, melainkan juga perlawanan ideologis berbasis nilai tradisional dan keagamaan yang menumbuhkan nasionalisme awal masyarakat Jawa. Strategi gerilya Diponegoro, termasuk mobilisasi massa dan penguasaan medan, mampu menandingi kekuatan kolonial dalam waktu yang cukup lama. Penelitian ini menjadi dasar penting bagi penulis karena memberikan konteks historis yang kaya dan relevan dalam memahami dinamika strategi perlawanan lokal yang mendekati konsep perang rakyat semesta, serta memperkaya perspektif analisis terhadap efektivitas strategi gerilya dalam melawan sistem militer kolonial yang lebih unggul secara logistik dan teknologi.

Penelitian ketiga adalah Penelitian berjudul "Refleksi Strategis Kepemimpinan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa Tahun 1825–1830 dalam Penguatan Fundamental Strategi Perang Rakyat Semesta Indonesia" (Rukmi & Midhio, 2024) Penelitian ini menganalisis kepemimpinan strategis Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa serta relevansinya terhadap penguatan konsep Perang Rakyat Semesta Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Diponegoro dalam mempertahankan perlawanan selama lima tahun tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh kemampuannya membangun legitimasi sosial, mengonsolidasikan dukungan masyarakat, dan mengintegrasikan aspek religius, budaya, serta politik dalam perjuangannya. Penelitian ini menegaskan bahwa karakter kepemimpinan Diponegoro mencerminkan prinsip-prinsip pertahanan semesta yang melibatkan rakyat sebagai komponen utama pertahanan negara. Penelitian ini relevan karena

memberikan perspektif mengenai hubungan antara kepemimpinan strategis, mobilisasi rakyat, dan pertahanan nasional yang juga menjadi fokus penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena paling sesuai untuk menggali secara mendalam karakteristik strategi gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa (1825–1830), serta menganalisisnya melalui lensa teori perang generasi kedua. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks historis, sosial, dan ideologis dari gerakan perlawanan yang terjadi, termasuk motivasi, kepemimpinan, dukungan masyarakat, dan dinamika strategi yang digunakan dalam melawan kolonialisme Belanda. Seperti dijelaskan oleh Creswell (2018), metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas dalam konteks naturalistik dan menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh para aktor sejarah dan lingkungan sosialnya. Pendekatan ini menempatkan konteks budaya dan sosial sebagai kerangka penting dalam analisis, serta berfokus pada proses dan dinamika daripada sekadar hasil akhir. Analisis dilakukan secara induktif, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam menafsirkan data kualitatif dari literatur sejarah, dokumen arsip, serta kajian teori yang relevan. Metode kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai dimensi taktis dan strategis dari perlawanan Diponegoro, mulai dari peran jaringan sosial, penguasaan medan, hingga simbolisme ideologis yang membentuk semangat gerakan. Fokus utama bukan pada generalisasi data historis, melainkan pada pemahaman kontekstual yang mendalam mengenai efektivitas strategi gerilya Diponegoro dan kontribusinya terhadap pembentukan pola pikir strategis dalam pertahanan nasional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks historis, sosial, dan strategis dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa (1825–1830). Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk mengeksplorasi, menafsirkan, dan memahami fenomena strategi gerilya dalam kerangka teori perang generasi kedua melalui pendekatan historis dan teoritis yang holistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan studi kasus, yaitu menggambarkan secara sistematis peristiwa dan strategi yang digunakan oleh Diponegoro, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori militer dan sosial-politik yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah bagaimana karakteristik strategi gerilya Diponegoro terbentuk, bagaimana taktik tersebut dijalankan, dan sejauh mana strategi tersebut efektif dalam menghadapi kekuatan kolonial Belanda yang mengadopsi model perang generasi kedua. Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menganalisis strategi gerilya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830). Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika historis, sosial, politik, dan militer yang melatarbelakangi perlawanan Diponegoro terhadap kolonialisme Belanda. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti taktik militer yang digunakan, tetapi juga menelaah keterlibatan rakyat, peran ideologi, serta pemanfaatan ruang geografi sebagai elemen kunci strategi gerilya. Studi kasus ini memberikan ruang untuk mengaitkan realitas historis Perang Jawa dengan teori-teori perang gerilya dari David Galula, konsep Perang Semesta, dan gagasan A.H. Nasution. Dengan demikian, penggunaan studi kasus memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana strategi lokal yang kontekstual dapat dipahami dalam kerangka teori global maupun nasional, sekaligus memperkuat kontribusi penelitian terhadap kajian sejarah militer dan studi pertahanan.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi yang mendalam mengenai interaksi antara faktor ideologis, geografis, dan sosial dalam pembentukan strategi gerilya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi historis, tetapi juga kontribusi konseptual terhadap pengembangan strategi pertahanan nasional berbasis sejarah dan budaya lokal. Penelitian dilaksanakan di wilayah Magelang dan Jakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan aktor strategis sehingga dapat membuat penelitian ini memahami Strategi Gerilya dalam Perang Diponegoro. Studi pustaka dan studi dokumen di beberapa lokasi. Beberapa lokasi penelitian antara lain: Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI), Jakarta. Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), Jakarta. Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro, Magelang. Penelitian dimulai dari penentuan judul pada bulan Desember 2025 dengan rencana penelitian selama 6 bulan hingga Juni 2026.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan strategi, taktik, serta dinamika perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830). Arikunto (2006) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis seperti dokumen resmi, laporan, buku, transkrip, serta publikasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi meliputi arsip sejarah kolonial, naskah-naskah tentang Perang Jawa, catatan perjuangan Pangeran Diponegoro, serta literatur akademik yang membahas teori perang generasi kedua dan strategi gerilya.
2. Studi Pustaka. Studi pustaka digunakan sebagai dasar konseptual dan teoritis dalam penelitian ini. Menurut Nazir (1998), studi pustaka merupakan langkah penting setelah peneliti menentukan topik penelitian, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dan mendukung topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, studi pustaka bertujuan untuk menghimpun teori-teori dan konsep-konsep strategis yang berkaitan dengan strategi gerilya, perang asimetris, dan teori perang generasi kedua. Selain itu, teori-teori pendukung seperti teori Clausewitz tentang trinitas perang, teori deprivasi relatif, dan teori mobilisasi sumber daya juga dijadikan pijakan dalam menganalisis strategi perlawanan Pangeran Diponegoro.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Mengenai Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemilihan Strategi Gerilya Pangeran Diponegoro

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sejarah, diketahui bahwa munculnya Perang Jawa tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik Jawa pada awal abad ke-19. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Jawa tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda kembali menerapkan kebijakan yang semakin memperkuat kontrol politik dan ekonomi terhadap wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta (Carey, 2019). Intervensi kolonial dilakukan melalui pengaturan administrasi pemerintahan, penguasaan lahan produktif, peningkatan pajak, serta pembatasan kewenangan para bangsawan lokal. Data yang diperoleh dari penelitian Zahro, Subaryana, dan Mardikun (2021) menunjukkan bahwa masyarakat Jawa mengalami tekanan ekonomi akibat meningkatnya beban pajak dan praktik eksploitasi sumber daya yang dilakukan pemerintah kolonial. Kondisi tersebut diperparah dengan berbagai kebijakan yang dianggap mengganggu nilai budaya dan keagamaan masyarakat Jawa. Salah satu peristiwa yang paling sering disebut dalam dokumen sejarah adalah pemasangan patok jalan di wilayah Tegalrejo yang melintasi area makam leluhur

Pangeran Diponegoro. Menurut Carey (2019), tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol sakral yang dihormati masyarakat Jawa dan menjadi pemicu langsung meletusnya konflik. Data lain yang diperoleh dari Sari (2023) memperlihatkan bahwa konflik yang berkembang tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan politik, tetapi juga oleh faktor psikologis dan identitas budaya. Pangeran Diponegoro dipandang sebagai tokoh yang mampu merepresentasikan nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa yang dianggap terancam oleh kolonialisme. Oleh karena itu, gerakan yang dipimpinnya memperoleh dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, ulama, santri, hingga bangsawan lokal.

Penelitian Isnaeniah et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Diponegoro muncul karena adanya kesamaan persepsi mengenai ketidakadilan yang dilakukan Belanda. Kondisi ini sejalan dengan konsep deprivasi relatif yang menjelaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat berkembang ketika terdapat kesenjangan antara harapan sosial dengan realitas yang dialami. Akumulasi ketidakpuasan tersebut kemudian menjadi dasar terbentuknya perlawanan kolektif yang berkembang menjadi perang berskala besar. Sumber-sumber sejarah juga menunjukkan bahwa Diponegoro memanfaatkan jaringan sosial dan keagamaan sebagai sarana mobilisasi perlawanan. Carey (2019) mencatat bahwa jaringan pesantren, tokoh agama, dan elite lokal memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi serta membangun legitimasi perjuangan. Data tersebut menunjukkan bahwa pemilihan strategi gerilya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan militer, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang memungkinkan terbentuknya basis dukungan yang kuat.

Data Mengenai Karakteristik dan Penerapan Strategi Gerilya Pangeran Diponegoro

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa strategi utama yang digunakan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa adalah perang gerilya. Menurut Carey (2019), setelah serangan Belanda terhadap Tegalrejo pada tahun 1825, Diponegoro memilih menghindari pertempuran terbuka dan memindahkan pusat perjuangannya ke wilayah pedalaman yang lebih sulit dijangkau oleh pasukan kolonial. Data yang diperoleh dari Ariwibowo (2021) menunjukkan bahwa kondisi geografis Jawa bagian tengah sangat mendukung penerapan strategi gerilya. Kawasan perbukitan, hutan, sungai, dan lembah dimanfaatkan sebagai jalur pergerakan pasukan serta lokasi penyergapan terhadap konvoi Belanda. Salah satu lokasi yang memiliki peran strategis adalah Gua Selarong yang digunakan sebagai markas utama gerakan perlawanan. Lokasi tersebut memberikan keuntungan berupa perlindungan alam sekaligus kemudahan mobilitas menuju berbagai wilayah operasi. Dokumen kolonial yang dikaji Carey (2019) memperlihatkan bahwa pasukan Diponegoro secara konsisten menerapkan pola operasi *hit-and-run*, serangan mendadak, penyergapan, dan pemutusan jalur logistik. Pola tersebut menyebabkan Belanda mengalami kesulitan melakukan identifikasi terhadap pusat kekuatan gerilyawan. Serangan yang dilakukan dalam kelompok kecil memungkinkan pasukan Diponegoro bergerak cepat dan menghindari kerugian besar akibat konfrontasi langsung dengan pasukan kolonial yang memiliki keunggulan artileri dan persenjataan modern.

Data yang diperoleh dari Hanik dan Tatik (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian Belanda pada fase awal perang disebabkan oleh serangan mendadak yang dilakukan di jalur logistik dan komunikasi. Strategi ini sesuai dengan prinsip perang gerilya yang menekankan pemanfaatan kelemahan musuh daripada menghadapi kekuatan utama lawan secara langsung. Selain memanfaatkan medan, Diponegoro juga mengembangkan sistem organisasi yang fleksibel. Menurut Dewi et al. (2020), pasukan gerilya dibagi ke dalam unit-unit kecil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Sentot Ali Basah dan Kyai Mojo. Struktur

semacam ini memungkinkan operasi berlangsung secara mandiri tanpa bergantung pada satu pusat komando yang tetap. Data dari Galula (2006) menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan perang gerilya adalah kemampuan memperoleh dukungan populasi. Dalam konteks Perang Jawa, masyarakat desa berperan sebagai penyedia logistik, informasi, tempat perlindungan, dan jalur komunikasi bagi pasukan Diponegoro. Isnaeniah et al. (2024) mencatat bahwa sistem logistik berbasis masyarakat tersebut membuat Belanda kesulitan memutus aliran dukungan terhadap gerilyawan. Dari perspektif strategi militer, pola operasi Diponegoro menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *Indirect Approach* yang dikemukakan Liddell Hart (1967). Data menunjukkan bahwa Diponegoro tidak berupaya menghancurkan seluruh kekuatan Belanda secara langsung, tetapi berfokus pada gangguan terhadap logistik, komunikasi, dan mobilitas pasukan kolonial. Pendekatan tersebut menghasilkan tekanan fisik dan psikologis yang signifikan terhadap Belanda. Kajian terhadap teori Perang Generasi Kedua juga menunjukkan adanya karakteristik yang relevan. Lind (2021) menjelaskan bahwa perang generasi kedua ditandai oleh dominasi kekuatan tembakan, organisasi militer yang terstruktur, dan kontrol wilayah. Dalam Perang Jawa, karakteristik tersebut tampak pada pihak Belanda melalui penggunaan artileri, infanteri reguler, dan strategi Benteng *Stelsel*. Sebaliknya, strategi Diponegoro berkembang sebagai respons asimetris terhadap model peperangan konvensional tersebut.

Data Mengenai Relevansi Strategi Diponegoro terhadap Konsep Pertahanan Rakyat Semesta

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa strategi Diponegoro memiliki sejumlah karakteristik yang relevan dengan konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Data yang diperoleh dari Nasution (1953) menunjukkan bahwa konsep perang rakyat menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam mempertahankan negara. Prinsip ini terlihat jelas dalam strategi Diponegoro yang mengintegrasikan rakyat sebagai penyedia logistik, sumber informasi, serta bagian dari kekuatan pertahanan. Penelitian Meideri dan Prakoso (2021) menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Diponegoro memiliki karakteristik perang semesta karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam satu tujuan perjuangan bersama. Mobilisasi rakyat tidak hanya dilakukan dalam bentuk pertempuran, tetapi juga dalam dukungan sosial, ekonomi, dan moral terhadap gerakan perlawanan. Data yang diperoleh dari Rukmi dan Midhio (2024) memperlihatkan bahwa kepemimpinan Diponegoro berhasil membangun kohesi sosial yang kuat melalui kombinasi nilai religius, budaya, dan nasionalisme lokal. Kondisi ini menciptakan daya tahan sosial yang memungkinkan gerakan perlawanan bertahan dalam jangka waktu panjang.

Dalam perspektif Clausewitz (1976), keberhasilan suatu perang dipengaruhi oleh interaksi antara rakyat, militer, dan kepemimpinan politik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut hadir secara kuat dalam Perang Jawa. Rakyat memberikan dukungan sosial dan logistik, Diponegoro bertindak sebagai pemimpin politik dan moral, sedangkan pasukan gerilya berfungsi sebagai instrumen militer yang menghubungkan keduanya. Secara keseluruhan, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa strategi gerilya Pangeran Diponegoro dibangun melalui integrasi faktor sosial-politik, dukungan masyarakat, pemanfaatan geografis, fleksibilitas organisasi, dan legitimasi ideologis. Seluruh elemen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan teori Perang Gerilya Galula, Perang Rakyat Nasution, Trinitas Clausewitz, *Indirect Approach* Liddell Hart, dan konsep pertahanan rakyat semesta yang menjadi fondasi pertahanan nasional Indonesia saat ini.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai strategi gerilya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830) dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap teori Trinitas Clausewitz, Perang Generasi Kedua, teori perang gerilya David Galula, dan teori perang gerilya A.H. Nasution. Berdasarkan hasil analisis data, strategi Diponegoro menunjukkan karakteristik perang asimetris yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga integrasi antara dukungan rakyat, legitimasi ideologis, pemanfaatan medan, serta fleksibilitas organisasi. Integrasi berbagai elemen tersebut menjadikan Perang Jawa sebagai salah satu bentuk perang rakyat terbesar dalam sejarah kolonial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi gerilya yang dipilih oleh Pangeran Diponegoro tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan militer, melainkan sebagai respons terhadap akumulasi tekanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di Jawa pada awal abad ke-19. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, tekanan tersebut berasal dari intervensi kolonial Belanda terhadap struktur pemerintahan lokal, eksploitasi ekonomi melalui sistem pajak dan penguasaan tanah, serta gangguan terhadap nilai-nilai budaya dan religius masyarakat Jawa. Dalam perspektif Teori Deprivasi Relatif yang dikemukakan Gurr (1970), kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat Jawa terhadap tatanan sosial yang adil dengan realitas kolonial yang mereka alami. Masyarakat tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga kehilangan ruang politik dan simbol-simbol identitas budaya yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Peristiwa pemasangan patok jalan di Tegalrejo yang melintasi kawasan makam leluhur Diponegoro menjadi simbol konkret dari deprivasi tersebut karena dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai yang dihormati masyarakat Jawa.

Namun demikian, ketidakpuasan sosial tidak secara otomatis menghasilkan perlawanan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Diponegoro membangun gerakan perlawanan dipengaruhi oleh kemampuannya memobilisasi sumber daya sosial yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan Teori Mobilisasi Sumber Daya yang dikembangkan McCarthy dan Zald (1977), yang menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial bergantung pada kemampuan mengorganisasi sumber daya manusia, jaringan sosial, legitimasi, dan dukungan material. Dalam konteks Perang Jawa, Diponegoro berhasil memanfaatkan jaringan ulama, pesantren, bangsawan lokal, serta masyarakat pedesaan untuk membangun sistem dukungan yang menopang keberlangsungan perang gerilya. Dengan demikian, strategi gerilya Diponegoro dapat diinterpretasikan sebagai bentuk adaptasi strategis yang lahir dari kombinasi antara ketidakpuasan kolektif masyarakat dan kemampuan mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh kepemimpinan Diponegoro. Faktor-faktor inilah yang menjadi fondasi utama munculnya perang rakyat berskala besar dalam Perang Jawa 1825–1830. Dalam perspektif Trinitas Clausewitz, perang dipahami sebagai interaksi antara tiga unsur utama, yaitu rakyat, militer, dan pemerintah atau kepemimpinan politik (Clausewitz, 1976). Ketiga unsur tersebut bekerja secara simultan dalam membentuk dinamika peperangan. Pada konteks Perang Jawa, unsur rakyat terlihat melalui keterlibatan aktif masyarakat desa, ulama, santri, dan kelompok bangsawan lokal yang mendukung perjuangan Diponegoro. Dukungan tersebut tidak hanya berupa partisipasi tempur, tetapi juga mencakup penyediaan logistik, informasi, tempat persembunyian, dan jalur komunikasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perang yang dipimpin Diponegoro memiliki basis sosial yang kuat sehingga tidak dapat dipisahkan dari dukungan masyarakat Jawa secara luas.

Dari sisi kepemimpinan, Diponegoro berperan sebagai pusat legitimasi moral, religius, dan politik. Kepemimpinan Diponegoro tidak hanya dibangun melalui otoritas bangsawan, tetapi juga melalui simbolisme keagamaan yang memperkuat loyalitas masyarakat. Dalam

banyak sumber sejarah, Diponegoro dipandang sebagai figur yang melindungi identitas sosial dan religius masyarakat Jawa dari dominasi kolonial (Carey, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur kepemimpinan dalam Trinitas Clausewitz tidak hanya berfungsi mengatur strategi perang, tetapi juga membangun legitimasi sosial yang mampu menggerakkan dukungan rakyat dalam jangka panjang. Unsur militer dalam Trinitas Clausewitz terlihat melalui operasi gerilya yang dilakukan secara fleksibel oleh pasukan Diponegoro. Operasi tersebut tidak mengikuti pola perang konvensional, tetapi mengandalkan mobilitas, penyergapan, dan serangan tidak langsung terhadap titik-titik lemah Belanda. Ketiga unsur dalam trinitas tersebut rakyat, kepemimpinan, dan operasi militer membentuk hubungan yang saling memperkuat sehingga menciptakan ketahanan perang yang cukup lama. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi Diponegoro memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep perang Clausewitzian yang menempatkan perang sebagai fenomena politik dan sosial, bukan sekadar benturan fisik antar pasukan.

Selain konsep Trinitas Clausewitz, hasil penelitian juga menunjukkan adanya benturan antara strategi Diponegoro dengan karakteristik Perang Generasi Kedua. Menurut Lind (2021), perang generasi kedua ditandai oleh dominasi kekuatan militer konvensional yang mengandalkan artileri, formasi besar, jalur suplai terpusat, dan struktur komando formal. Dalam Perang Jawa, Belanda merepresentasikan bentuk perang generasi kedua melalui penggunaan pasukan reguler, benteng pertahanan, dan operasi militer linear yang berorientasi pada penguasaan wilayah secara langsung. Pada fase awal perang, Belanda menggunakan strategi pengejaran terbuka dengan mengandalkan keunggulan persenjataan dan jumlah pasukan. Namun, strategi tersebut mengalami banyak hambatan karena tidak sesuai dengan karakter medan Jawa dan pola perang gerilya Diponegoro. Pasukan Belanda yang bergerak dalam formasi besar mengalami kesulitan melakukan manuver di wilayah hutan, perbukitan, dan jalur sempit. Selain itu, ketergantungan Belanda terhadap jalur logistik membuat mereka rentan terhadap serangan mendadak yang dilakukan pasukan Diponegoro. Strategi Diponegoro memperlihatkan pendekatan yang berlawanan dengan pola perang generasi kedua. Diponegoro tidak berusaha menghadapi Belanda melalui perang terbuka, melainkan melalui perang manuver yang memanfaatkan kecepatan dan kejutan. Serangan dilakukan pada titik-titik lemah seperti konvoi logistik, pos kecil, dan pasukan yang terpisah dari formasi utama (Hanik & Tatik, 2013). Dalam konteks ini, pasukan Diponegoro berhasil mengeksploitasi kelemahan sistem perang konvensional Belanda yang cenderung lambat dan bergantung pada struktur organisasi rigid.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan awal Diponegoro bukan semata karena kekuatan tempur, tetapi karena kemampuan memahami kelemahan operasional musuh. Perang Jawa memperlihatkan bahwa kekuatan militer modern dapat mengalami kesulitan ketika menghadapi perang asimetris yang berbasis mobilitas dan dukungan sosial. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa superioritas teknologi tidak selalu menjamin kemenangan apabila pihak lawan mampu memanfaatkan lingkungan sosial dan geografis secara efektif. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa strategi Diponegoro memiliki kesesuaian yang kuat dengan Teori Indirect Approach yang dikemukakan oleh Liddell Hart (1967). Menurut teori ini, kemenangan tidak selalu dicapai melalui penghancuran langsung terhadap kekuatan utama musuh, melainkan dengan menciptakan gangguan terhadap keseimbangan strategis lawan. Pendekatan tidak langsung dilakukan melalui serangan terhadap logistik, komunikasi, moral, dan kebebasan manuver musuh. Dalam Perang Jawa, pola operasi yang dilakukan pasukan Diponegoro memperlihatkan karakteristik tersebut secara jelas. Serangan lebih sering diarahkan kepada konvoi logistik, jalur komunikasi, dan pos-pos kecil Belanda dibandingkan terhadap basis pertahanan utama kolonial. Strategi ini

menyebabkan terganggunya kemampuan operasional Belanda sekaligus menciptakan tekanan psikologis karena pasukan kolonial tidak mampu memprediksi lokasi dan waktu serangan secara akurat.

Keberhasilan strategi tersebut menunjukkan bahwa Diponegoro memahami pentingnya mengeksploitasi kelemahan lawan dibandingkan menghadapi kekuatan utamanya secara langsung. Oleh karena itu, perang gerilya yang diterapkan Diponegoro dapat dipandang sebagai bentuk awal penerapan strategi tidak langsung yang kemudian menjadi salah satu prinsip utama dalam perang asimetris modern. Dalam perspektif teori perang gerilya David Galula, keberhasilan gerilya sangat ditentukan oleh kemampuan memperoleh dan mempertahankan dukungan rakyat (Galula, 2006). Galula menjelaskan bahwa populasi merupakan pusat gravitasi utama dalam perang gerilya karena dukungan masyarakat menentukan keberlangsungan logistik, komunikasi, dan legitimasi gerakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi Diponegoro memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan teori tersebut. Masyarakat Jawa berfungsi sebagai bagian integral dari sistem perang Diponegoro. Dukungan rakyat terlihat melalui penyediaan makanan, perlindungan, jalur mobilitas, hingga informasi mengenai pergerakan Belanda. Jaringan pesantren dan ulama juga berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan perlawanan dan membangun solidaritas sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perang Diponegoro bukan sekadar perang militer, tetapi perang sosial yang melibatkan masyarakat secara luas.

Galula juga menjelaskan bahwa dalam perang gerilya, garis pemisah antara kombatan dan non-kombatan sering kali menjadi kabur. Situasi ini terlihat jelas dalam Perang Jawa, di mana masyarakat desa tidak hanya menjadi pendukung pasif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan gerilya. Akibatnya, Belanda mengalami kesulitan membedakan antara masyarakat biasa dan pendukung Diponegoro. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian operasional yang memperbesar tekanan terhadap pasukan kolonial. Pembahasan hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Belanda akhirnya memahami pentingnya dukungan rakyat dalam perang gerilya. Hal ini terlihat dari penerapan Benteng *Stelsel* yang bertujuan memutus hubungan antara Diponegoro dan masyarakat pendukungnya (Ariwibowo, 2021). Benteng-benteng kecil dibangun untuk mempersempit ruang gerak gerilyawan dan mengawasi desa-desa yang dicurigai memberikan bantuan logistik. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Belanda mulai menggeser pendekatan mereka dari operasi ofensif menuju kontrol populasi dan wilayah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan rakyat terhadap Diponegoro tetap bertahan meskipun Belanda menerapkan pengawasan ketat. Loyalitas masyarakat dipengaruhi oleh legitimasi religius dan moral yang dimiliki Diponegoro sebagai pemimpin perjuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor ideologis memiliki pengaruh besar terhadap daya tahan perang gerilya. Dengan demikian, teori Galula mengenai pentingnya populasi sebagai pusat gravitasi perang gerilya terbukti relevan dalam konteks Perang Jawa. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan teori perang gerilya A.H. Nasution. Menurut Nasution (1953), perang gerilya merupakan bentuk perang rakyat yang mengandalkan fleksibilitas organisasi, mobilitas tinggi, dan pemanfaatan medan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Prinsip tersebut terlihat jelas dalam strategi yang diterapkan Diponegoro selama Perang Jawa.

Pasukan Diponegoro tidak dibangun dalam struktur militer formal yang kaku, melainkan melalui unit-unit kecil yang bergerak secara fleksibel. Tokoh-tokoh seperti Sentot Ali Basah dan Kyai Mojo memimpin kelompok-kelompok gerilya yang mampu melakukan operasi independen sesuai kondisi lapangan. Struktur seperti ini menciptakan kemampuan adaptasi tinggi dan mempersulit Belanda dalam memetakan kekuatan utama gerilyawan. Selain itu, mobilitas menjadi inti dari strategi Diponegoro. Pasukan bergerak melalui jalur-jalur

tradisional yang hanya diketahui masyarakat lokal sehingga sulit diprediksi oleh Belanda. Pemanfaatan hutan, sungai, gua, dan lembah memperkuat kemampuan gerilya untuk melakukan penyergapan sekaligus menghindari bentrokan frontal. Dalam perspektif Nasution, medan merupakan bagian penting dari sistem pertahanan gerilya karena mampu mengurangi keunggulan teknologi musuh. Penelitian juga menunjukkan bahwa fleksibilitas organisasi memungkinkan pasukan Diponegoro bertahan meskipun menghadapi tekanan besar dari Belanda. Ketika satu wilayah berhasil dikuasai kolonial, pasukan gerilya dapat berpindah ke wilayah lain tanpa kehilangan kapasitas operasi secara keseluruhan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa strategi Diponegoro memiliki kesesuaian dengan konsep perang rakyat yang dikembangkan Nasution setelah kemerdekaan Indonesia.

Selain aspek militer, pembahasan penelitian juga menunjukkan bahwa perang Diponegoro memiliki dimensi psikologis dan ideologis yang kuat. Narasi jihad melawan kolonialisme memperkuat motivasi masyarakat untuk mendukung perjuangan. Dalam konteks ini, perang bukan hanya dipahami sebagai konflik perebutan wilayah, tetapi juga sebagai perjuangan mempertahankan kehormatan sosial dan agama. Carey (2011) menjelaskan bahwa Diponegoro berhasil membangun citra dirinya sebagai pemimpin spiritual yang memiliki legitimasi moral di mata masyarakat Jawa. Dimensi ideologis tersebut memberikan dampak besar terhadap ketahanan moral pasukan. Meskipun menghadapi keterbatasan persenjataan dan tekanan militer yang berat, loyalitas masyarakat terhadap Diponegoro tetap tinggi pada fase-fase awal perang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa moral dan legitimasi sosial memiliki pengaruh penting dalam perang asimetris. Dalam perspektif Clausewitz, faktor moral bahkan sering kali lebih menentukan dibanding kekuatan material semata. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi Diponegoro memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan persenjataan modern dan amunisi. Sebagian besar pasukan menggunakan senjata tradisional seperti tombak, keris, dan senapan sederhana sehingga efektivitas tempur sangat bergantung pada situasi medan dan efek kejutan. Selain itu, perbedaan kemampuan antarunit gerilya juga memengaruhi konsistensi operasi dalam beberapa fase perang.

Keterbatasan lainnya muncul ketika Belanda berhasil menerapkan Benteng *Stelsel* secara sistematis. Jaringan benteng kecil yang saling terhubung secara bertahap mempersempit ruang gerak Diponegoro dan mengurangi efektivitas mobilitas gerilya. Pengawasan ketat terhadap desa-desa juga mulai memengaruhi jalur logistik dan komunikasi masyarakat pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perang gerilya memiliki fleksibilitas tinggi, keberlanjutan operasinya tetap bergantung pada kemampuan mempertahankan hubungan dengan populasi dan ruang gerak yang memadai. Selain memiliki relevansi terhadap teori-teori perang klasik dan modern, strategi gerilya Diponegoro juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara aspek militer dan aspek sosial budaya masyarakat Jawa. Dalam Perang Jawa, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pendukung logistik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas perjuangan itu sendiri. Perlawanan terhadap Belanda berkembang menjadi gerakan sosial yang didasarkan pada rasa ketidakadilan, hilangnya kedaulatan budaya, dan ancaman terhadap nilai-nilai religius masyarakat. Dengan demikian, perang yang dipimpin Diponegoro memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar konflik militer antara dua kekuatan bersenjata.

Dalam perspektif sosiologis, dukungan masyarakat terhadap Diponegoro dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas kolektif terhadap ancaman eksternal. Kolonialisme Belanda tidak hanya memengaruhi struktur ekonomi masyarakat, tetapi juga mengganggu sistem sosial dan budaya yang telah lama berkembang di Jawa. Intervensi terhadap keraton, pembebanan pajak yang tinggi, monopoli perdagangan, serta eksploitasi tanah menyebabkan munculnya

ketegangan sosial yang meluas (Ricklefs, 2008). Diponegoro kemudian hadir sebagai simbol perlawanan yang mampu menyatukan berbagai kelompok sosial dalam satu tujuan bersama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi gerilya Diponegoro sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimilikinya. Dalam perang asimetris, legitimasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan gerakan perlawanan. Menurut Kilcullen (2010), kelompok gerilya yang memperoleh legitimasi dari masyarakat akan memiliki daya tahan lebih besar dibanding kekuatan yang hanya mengandalkan dominasi militer. Hal ini terlihat dalam Perang Jawa, di mana Belanda memiliki keunggulan teknologi dan organisasi militer, tetapi tetap mengalami kesulitan menghadapi gerakan Diponegoro selama bertahun-tahun. Legitimasi Diponegoro dibangun melalui kombinasi identitas bangsawan, simbol keagamaan, dan kedekatan dengan rakyat. Sebagai keturunan keraton, Diponegoro memiliki pengaruh politik yang cukup kuat. Namun, pengaruh tersebut semakin besar karena Diponegoro juga dipandang sebagai figur religius yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kehormatan masyarakat Jawa. Dalam berbagai sumber sejarah, Diponegoro digambarkan sebagai pemimpin spiritual yang memiliki hubungan erat dengan ulama dan jaringan pesantren (Carey, 2011). Kondisi tersebut memperkuat posisi Diponegoro sebagai simbol perjuangan moral dan religius melawan kolonialisme.

Dari sudut pandang Clausewitz, legitimasi tersebut berkaitan erat dengan unsur passion dalam Trinitas Clausewitz. Passion atau emosi kolektif masyarakat menjadi sumber energi yang mendorong keberlangsungan perang. Dalam konteks Perang Jawa, kemarahan masyarakat terhadap kebijakan kolonial menciptakan dukungan luas terhadap perjuangan Diponegoro. Emosi kolektif tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk dukungan logistik, partisipasi tempur, dan loyalitas sosial yang memperkuat sistem gerilya. Selain faktor legitimasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi Diponegoro memiliki karakteristik adaptif yang sangat kuat. Adaptasi tersebut terlihat dari kemampuan gerilyawan menyesuaikan pola operasi sesuai kondisi medan dan perubahan strategi Belanda. Pada fase awal perang, pasukan Diponegoro lebih banyak melakukan penyerangan terhadap konvoi dan pos-pos kecil kolonial. Namun ketika Belanda mulai memperkuat pertahanan wilayah melalui Benteng *Stelsel*, pola operasi gerilya berubah menjadi lebih tersebar dan menghindari konsentrasi pasukan besar.

Kemampuan adaptasi tersebut merupakan salah satu ciri utama perang gerilya modern. Mao Zedong (2000) menjelaskan bahwa gerilya harus mampu berubah sesuai situasi medan dan kondisi politik agar dapat bertahan menghadapi musuh yang lebih kuat. Prinsip ini juga terlihat dalam strategi Diponegoro yang tidak terpaku pada pola operasi tertentu. Pasukan gerilya dapat berpindah wilayah, mengubah jalur komunikasi, dan memanfaatkan dukungan masyarakat secara fleksibel untuk mempertahankan keberlangsungan perang. Dalam konteks Perang Jawa, adaptasi juga terlihat pada pemanfaatan ruang geografis sebagai alat pertahanan. Kawasan pegunungan, hutan, dan lembah dimanfaatkan untuk menciptakan hambatan terhadap pergerakan Belanda. Pasukan Diponegoro memahami bahwa medan Jawa memberikan keuntungan besar bagi operasi gerilya karena membatasi efektivitas artileri dan formasi besar kolonial. Dengan demikian, medan tidak hanya dipahami sebagai lokasi perang, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pertahanan.

Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep perang rakyat yang dikembangkan A.H. Nasution. Menurut Nasution (1953), perang gerilya harus mampu memanfaatkan seluruh potensi wilayah sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Medan menjadi alat untuk memperbesar kekuatan sendiri sekaligus memperkecil efektivitas kekuatan lawan. Dalam konteks Diponegoro, pemanfaatan medan dilakukan secara maksimal melalui penguasaan jalur tradisional, penggunaan gua sebagai basis pertahanan, dan pemilihan wilayah

operasi yang sulit dijangkau pasukan kolonial. Selain medan fisik, penelitian ini juga memperlihatkan adanya pemanfaatan medan sosial dalam strategi Diponegoro. Medan sosial merujuk pada hubungan masyarakat, jaringan ulama, dan struktur budaya yang mendukung keberlangsungan perang. Dukungan masyarakat membuat pasukan Diponegoro dapat bergerak tanpa terlalu bergantung pada basis militer permanen. Masyarakat desa menyediakan tempat persembunyian, jalur evakuasi, dan sistem distribusi logistik yang sulit dideteksi Belanda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan utama perang gerilya terletak pada kemampuan mengintegrasikan aspek militer dan sosial secara bersamaan. Dalam perspektif Galula, kontrol terhadap populasi merupakan inti dari perang gerilya maupun kontra-gerilya. Oleh sebab itu, ketika Belanda menyadari bahwa dukungan rakyat menjadi kekuatan utama Diponegoro, mereka mulai mengubah strategi operasi. Penerapan Benteng *Stelsel* merupakan bentuk adaptasi kolonial terhadap ancaman gerilya. Benteng-benteng kecil dibangun pada wilayah strategis untuk membatasi ruang gerak Diponegoro dan memutus hubungan dengan masyarakat pendukung (Ariwibowo, 2021).

Strategi Benteng *Stelsel* memperlihatkan bahwa Belanda mulai memahami karakter perang yang mereka hadapi. Jika pada awalnya Belanda menganggap Perang Jawa sebagai pemberontakan lokal yang dapat dihancurkan melalui operasi frontal, maka perkembangan perang menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak efektif. Belanda kemudian beralih pada strategi kontrol wilayah yang lebih sistematis. Setiap benteng berfungsi sebagai titik pengawasan sekaligus pusat operasi militer untuk mengamankan jalur komunikasi dan logistik kolonial. Meskipun demikian, penerapan Benteng *Stelsel* tidak serta-merta menghancurkan perlawanan Diponegoro. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasukan gerilya tetap mampu melakukan serangan sporadis meskipun ruang geraknya semakin terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa perang gerilya memiliki daya tahan tinggi karena tidak bergantung pada satu pusat kekuatan. Selama dukungan masyarakat masih bertahan, operasi gerilya tetap dapat dilakukan dalam skala tertentu. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keberlanjutan perang gerilya sangat dipengaruhi oleh kemampuan mempertahankan jaringan sosial dan logistik. Ketika pengawasan Belanda semakin ketat dan jalur komunikasi mulai terputus, efektivitas operasi gerilya perlahan menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perang gerilya meskipun fleksibel tetap memiliki kerentanan terhadap strategi isolasi wilayah dan kontrol populasi.

Dalam aspek organisasi, strategi Diponegoro menunjukkan pola kepemimpinan yang desentralistik. Unit-unit kecil dipimpin tokoh lokal yang memiliki pengaruh sosial di wilayah masing-masing. Pola seperti ini memberikan keuntungan berupa fleksibilitas operasi dan kemampuan bertahan ketika satu wilayah mengalami tekanan. Menurut Taber (2002), salah satu kekuatan utama perang gerilya adalah kemampuannya menyebar dalam unit-unit kecil sehingga sulit dihancurkan secara total oleh musuh. Pola organisasi Diponegoro memperlihatkan bahwa perang gerilya tidak membutuhkan struktur birokrasi militer yang rigid. Sebaliknya, keberhasilan perang lebih bergantung pada kemampuan membangun jaringan sosial yang loyal dan adaptif. Struktur seperti ini memungkinkan gerilyawan mempertahankan operasi meskipun tidak memiliki pusat komando permanen. Dalam konteks modern, pola tersebut sering ditemukan pada berbagai gerakan insurgensi yang mengandalkan dukungan masyarakat sebagai sumber kekuatan utama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi Diponegoro memiliki dimensi psikologis yang cukup signifikan. Serangan mendadak, operasi malam, dan penyergapan di wilayah sempit menciptakan tekanan psikologis terhadap pasukan Belanda. Ketidakmampuan memprediksi lokasi serangan menyebabkan moral pasukan kolonial mengalami penurunan dalam beberapa fase perang. Dalam perang asimetris, tekanan psikologis sering kali menjadi alat untuk mengurangi

efektivitas musuh tanpa harus memenangkan pertempuran besar. Dalam perspektif perang modern, strategi seperti ini dikenal sebagai psychological warfare atau perang psikologis. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan kekuatan fisik musuh, tetapi menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian operasional. Pasukan Belanda yang bergerak di wilayah Jawa harus menghadapi ancaman serangan mendadak di hampir setiap jalur pergerakan. Situasi tersebut memperbesar beban operasional dan memperlambat kemampuan manuver kolonial.

Selain itu, narasi religius yang dibangun Diponegoro juga memiliki fungsi psikologis terhadap masyarakat pendukung. Narasi jihad dan perjuangan moral menciptakan keyakinan bahwa perang melawan Belanda merupakan kewajiban bersama. Dalam banyak perang gerilya, faktor moral memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pasukan. Clausewitz bahkan menyebut faktor moral sebagai elemen yang sering kali lebih menentukan dibanding kekuatan material. Dalam konteks Perang Jawa, faktor moral tersebut memperkuat loyalitas masyarakat terhadap Diponegoro meskipun perang berlangsung dalam waktu lama dan menimbulkan korban besar. Dukungan masyarakat tidak hanya muncul karena kepentingan politik, tetapi juga karena adanya keyakinan ideologis dan religius terhadap perjuangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perang gerilya yang berhasil umumnya memiliki narasi perjuangan yang mampu diterima oleh masyarakat luas. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Perang Jawa memberikan dampak besar terhadap perubahan strategi militer Belanda di Hindia Belanda. Kerugian besar yang dialami Belanda memaksa pemerintah kolonial melakukan evaluasi terhadap pola operasi mereka. Menurut Ricklefs (2008), Perang Jawa menjadi salah satu konflik paling mahal yang pernah dihadapi Belanda di Asia Tenggara. Biaya perang yang tinggi dan banyaknya korban menunjukkan bahwa perang gerilya mampu menciptakan tekanan besar terhadap kekuatan kolonial modern.

Pengalaman menghadapi Diponegoro kemudian memengaruhi pendekatan Belanda terhadap wilayah-wilayah lain di Nusantara. Strategi kontrol wilayah, pengawasan populasi, dan pembangunan infrastruktur militer menjadi bagian penting dari kebijakan kolonial setelah Perang Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Diponegoro tidak hanya memiliki dampak lokal, tetapi juga memengaruhi perkembangan strategi kolonial secara lebih luas. Dari perspektif pertahanan nasional modern, strategi Diponegoro memiliki relevansi penting terhadap konsep perang rakyat semesta di Indonesia. Konsep tersebut menekankan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam sistem pertahanan negara. Dalam konteks Diponegoro, keterlibatan masyarakat dalam mendukung perang gerilya memperlihatkan bentuk awal dari perang rakyat yang berbasis partisipasi sosial. A.H. Nasution mengembangkan konsep perang rakyat berdasarkan pengalaman sejarah perjuangan Indonesia, termasuk strategi gerilya yang pernah dilakukan para tokoh perlawanan lokal. Dalam perang rakyat, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek perlindungan semata, tetapi sebagai bagian aktif dari sistem pertahanan nasional. Prinsip tersebut terlihat jelas dalam Perang Jawa, di mana masyarakat memiliki peran langsung dalam menopang keberlangsungan operasi gerilya.

Relevansi strategi Diponegoro terhadap pertahanan modern juga terlihat dalam konteks perang asimetris kontemporer. Banyak konflik modern menunjukkan bahwa kekuatan militer besar sering mengalami kesulitan menghadapi gerakan gerilya yang berbasis dukungan masyarakat. Pengalaman Amerika Serikat di Afghanistan dan Vietnam memperlihatkan bahwa superioritas teknologi tidak selalu mampu mengalahkan gerakan insurgensi yang memiliki legitimasi sosial kuat. Dalam konteks ini, strategi Diponegoro menunjukkan pola yang serupa, yaitu penggunaan dukungan rakyat dan medan untuk mengimbangi keunggulan militer lawan. Selain itu, strategi Diponegoro memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya integrasi antara aspek militer dan nonmiliter dalam perang. Perang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tempur, tetapi juga oleh legitimasi politik, dukungan sosial, dan ketahanan moral

masyarakat. Dengan demikian, konsep pertahanan modern perlu memahami bahwa ancaman tidak selalu dapat dihadapi melalui kekuatan militer semata, tetapi membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan masyarakat secara luas. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa strategi Diponegoro memiliki nilai historis penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Perjuangan Diponegoro dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan inspirasi bagi gerakan nasionalisme pada periode berikutnya. Nilai-nilai perjuangan tersebut terus berkembang dalam doktrin pertahanan nasional Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan rakyat dalam menghadapi ancaman.

Secara keseluruhan, pembahasan penelitian menunjukkan bahwa strategi gerilya Pangeran Diponegoro merupakan bentuk perang asimetris yang kompleks dan multidimensional. Strategi tersebut tidak hanya mengandalkan operasi militer, tetapi juga memanfaatkan legitimasi sosial, dukungan rakyat, pemanfaatan medan, fleksibilitas organisasi, serta kekuatan moral dan ideologis. Keseluruhan elemen tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan teori Trinitas Clausewitz, Perang Generasi Kedua, teori perang gerilya Galula, dan teori perang rakyat A.H. Nasution. Perang Jawa membuktikan bahwa kekuatan kecil yang mampu mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem pertahanan dapat memberikan tekanan besar terhadap kekuatan kolonial modern. Strategi Diponegoro juga memperlihatkan bahwa perang gerilya bukan sekadar bentuk perlawanan bersenjata, tetapi sistem perjuangan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, strategi gerilya Diponegoro memiliki relevansi penting tidak hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam pengembangan konsep pertahanan nasional dan studi perang asimetris modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi gerilya Diponegoro memiliki relevansi yang kuat terhadap konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menjadi dasar pertahanan nasional Indonesia. Relevansi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama dalam mendukung keberlangsungan perang. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia logistik, tetapi juga sebagai sumber informasi, perlindungan, dan legitimasi sosial bagi gerakan perlawanan.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan konsep People's War yang dikembangkan Mao Zedong (1961). Mao menekankan bahwa kekuatan utama perang rakyat terletak pada kemampuan mengintegrasikan rakyat ke dalam sistem perjuangan. Dalam konteks Perang Jawa, pasukan Diponegoro memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat pedesaan, jaringan pesantren, ulama, dan elite lokal sehingga menciptakan basis pertahanan yang sulit dihancurkan oleh Belanda. Hubungan tersebut memperlihatkan kesamaan dengan prinsip People's War yang menempatkan rakyat sebagai pusat gravitasi perang. Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan kesesuaian dengan konsep Trinitas Clausewitz yang menempatkan rakyat, kepemimpinan, dan kekuatan militer sebagai tiga unsur utama dalam perang. Diponegoro berperan sebagai pemimpin politik dan moral, masyarakat menjadi basis dukungan sosial, sedangkan pasukan gerilya berfungsi sebagai instrumen militer yang menghubungkan keduanya. Integrasi ketiga unsur tersebut membentuk sistem perlawanan yang memiliki daya tahan tinggi meskipun menghadapi tekanan kolonial yang besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi gerilya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830), dapat disimpulkan bahwa perang yang dipimpin Diponegoro merupakan bentuk perang asimetris berbasis perang rakyat yang mengintegrasikan dukungan masyarakat, legitimasi ideologis, pemanfaatan medan, dan fleksibilitas organisasi. Perang Jawa tidak hanya merupakan konflik militer melawan kolonial Belanda, tetapi juga bentuk perlawanan sosial, politik, budaya, dan religius terhadap dominasi

kolonial yang dianggap mengancam tatanan masyarakat Jawa. Penelitian menunjukkan bahwa strategi Diponegoro memiliki relevansi kuat dengan konsep Trinitas Clausewitz yang menekankan hubungan antara rakyat, militer, dan kepemimpinan politik. Dalam Perang Jawa, rakyat menjadi sumber utama dukungan logistik, perlindungan, dan informasi bagi pasukan gerilya. Kepemimpinan Diponegoro berfungsi sebagai pusat legitimasi moral dan religius yang mampu membangun loyalitas masyarakat, sedangkan unsur militer diwujudkan melalui operasi gerilya yang mengutamakan mobilitas, penyergapan, dan penghindaran benturan frontal. Integrasi ketiga unsur tersebut memungkinkan perang bertahan selama lima tahun meskipun menghadapi kekuatan kolonial yang lebih modern. Selain itu, strategi Diponegoro memperlihatkan benturan antara perang asimetris dan karakteristik Perang Generasi Kedua yang diterapkan Belanda. Belanda mengandalkan formasi besar, artileri, dan struktur militer konvensional, sedangkan Diponegoro menggunakan unit-unit kecil yang bergerak fleksibel dan memanfaatkan kondisi geografis Jawa. Strategi tersebut mampu mengurangi efektivitas operasi kolonial karena medan hutan, perbukitan, dan jalur sempit lebih menguntungkan pasukan gerilya dibanding tentara reguler Belanda.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa strategi Diponegoro memiliki kesesuaian dengan teori perang gerilya David Galula dan A.H. Nasution. Dukungan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberlangsungan perang gerilya karena rakyat menyediakan logistik, tempat perlindungan, dan jalur komunikasi. Pasukan Diponegoro juga menerapkan prinsip mobilitas tinggi, struktur organisasi fleksibel, dan pemanfaatan medan sebagaimana dijelaskan dalam konsep perang rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama perang gerilya tidak terletak pada superioritas persenjataan, melainkan pada kemampuan membangun hubungan erat dengan masyarakat dan memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari sistem pertahanan. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa strategi gerilya Diponegoro memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek persenjataan modern dan ketergantungan terhadap dukungan masyarakat. Ketika Belanda menerapkan Benteng *Stelsel* untuk mempersempit ruang gerak gerilyawan dan memutus hubungan dengan rakyat, efektivitas operasi Diponegoro mulai menurun. Meskipun demikian, perang gerilya tetap mampu memberikan tekanan besar terhadap Belanda dan memaksa kolonial mengubah strategi militernya secara signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi gerilya Pangeran Diponegoro merupakan bentuk perang rakyat yang kompleks dan multidimensional. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan kecil dengan dukungan sosial yang kuat mampu menghadapi kekuatan militer modern melalui mobilitas, legitimasi ideologis, dan pemanfaatan medan. Oleh karena itu, strategi Diponegoro memiliki relevansi penting dalam kajian perang asimetris, perang rakyat, dan pertahanan nasional Indonesia modern.

Saran

1. Saran Teoritis. Saran teoritis ini ditujukan untuk pengembangan ilmu pertahanan, khususnya dalam kajian strategi militer dan sejarah perlawanan bangsa:
 - a. Pengembangan Kajian Perang Generasi Lanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi gerilya Pangeran Diponegoro tidak hanya dari perspektif perang generasi kedua, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan ancaman Perang Generasi Keempat (4GW) atau Kelima (5GW), terutama pada aspek penggunaan narasi ideologis dan delegitimasi otoritas pusat.
 - b. Studi Komparatif Strategi Lokal. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang membandingkan strategi gerilya Diponegoro dengan tokoh perlawanan Nusantara lainnya (seperti Perang Aceh atau Perang Padri) untuk merumuskan sebuah Model Teoretis Gerilya Nusantara yang khas dan dapat diadopsi dalam literatur strategi militer dunia.

- c. Metodologi SLR dalam Sejarah Militer. Disarankan bagi akademisi untuk memperluas penggunaan metode Systematic Literature Review (SLR) dalam membedah naskah-naskah sejarah militer Indonesia lainnya guna menghasilkan sintesis data yang lebih objektif dan meminimalkan bias kolonial.
2. Saran Praktis. Saran praktis ini merupakan rekomendasi implementasi bagi para pemangku kepentingan terkait:
 - a. Bagi Markas Besar TNI AD. Mabesad disarankan untuk terus memperkuat integrasi antara militer dan rakyat melalui pembinaan teritorial yang adaptif karena dukungan rakyat merupakan center of gravity pertahanan nasional, merumuskan kebijakan pertahanan yang lebih menekankan pada pemahaman konteks lokal serta pendekatan perlawanan rakyat semesta (Sishankamrata), dan menjadikan pemanfaatan geografi nusantara sebagai "benteng alam" utama dalam menyusun strategi pertahanan berlapis.
 - b. Bagi Kodiklat TNI AD. Kodiklat TNI AD disarankan untuk menyusun skenario latihan simulasi pertempuran (wargaming) yang berbasis pada peristiwa sejarah Perang Jawa, seperti skenario pertahanan Gua Selarong atau penyerangan konvoi logistik musuh. Hal ini bertujuan untuk melatih para calon komandan dalam mengambil keputusan cepat di tengah situasi asimetris di mana musuh memiliki keunggulan teknologi dan persenjataan.
 - c. Bagi Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) TNI AD. LKT disarankan untuk mendalami pengembangan taktik unit kecil yang mobile dan fleksibel agar mampu melaksanakan operasi asimetris yang sulit diprediksi lawan, merumuskan sistem dukungan logistik yang terdesentralisasi dengan mencontoh mekanisme logistik rakyat guna mengurangi ketergantungan pada gudang suplai permanen, serta meningkatkan kemampuan teknis prajurit dalam mengeksploitasi setiap karakteristik medan geografis sebagai instrumen strategis untuk menciptakan tekanan terhadap musuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Ariwibowo, T. (2021). Strategi perang semesta: Pertempuran Pangeran Diponegoro menghadapi Belanda 1825–1830. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2537–2550. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2742>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. H. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Clausewitz, C. v. (1976). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Cole, B. (2020). Clausewitz's wondrous yet paradoxical trinity: The nature of war as a complex adaptive system. *Joint Force Quarterly*, 96(1), 42–49.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, V. M., Hartanto, W., & Puji, R. P. N. (2020). Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825–1830. *SiNDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 2(2), 147–158. <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/282>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Feak, C. B., & Swales, J. M. (2009). Telling a research story: Writing a literature review. *University of Michigan Press*. <https://doi.org/10.3998/mpub.309338>
- Galula, D. (2006). *Counterinsurgency warfare: Theory and practice*. Westport, CT: Praeger Security International. (Original work published 1964)
- Galula, D., Thompson, R., & United States Army. (2006). *FM 3-24: Counterinsurgency*. Washington, DC: United States Army and Marine Corps.



- Gurr, T. R. (2012). *Why men rebel* (40th anniversary ed.). New York, NY: Routledge. (Original work published 1970)
- Hanik, U., & Tatik, S. (2013). Implementasi Benteng *Stelsel* dan Dampaknya terhadap Gerilya Diponegoro. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic groups in conflict*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Isnaeniah, N., Putri, R., & Rahmawati, D. (2024). Gerakan Perlawanan Rakyat Jawa dalam Perspektif Sosial dan Budaya. Malang: UB Press.
- Isnaeniah, R. W., Sulistyadi, E., & Prasetyo, H. (2024). The war of Diponegoro: Causes, strategies, and impact on Indonesian politics, socio-culture, and economy. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(1), 186–192. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i1.7780>
- Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy* (2nd rev. ed.). Meridian Books.
- Lind, W. S. (2021). *4th generation warfare handbook*. Worthy Publishing.
- Mao, Z. (1961). *On guerrilla warfare*. University of Illinois Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- Meideri, A., & Prakoso, L. Y. (2021). Diponegoro war history in total war perspective in supporting strategies the national defense. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 5(4), 322–327. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2021.5414>
- Meideri, Y., & Prakoso, A. (2021). Keterbatasan Persenjataan Pasukan Diponegoro dan Dampaknya terhadap Dinamika Operasi. Bandung: Remaja Karya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mr. Super Genius. (2018, May 31). *Mengenal Perang Diponegoro Pati I*. BRITE Genius. <https://www.britegenius.com/index.php/article-categories/75-mengenal-perang-diponegoro-pati-i>
- Nasution, A. H. (1953). *Pokok-pokok gerilya*. Jakarta: Yayasan Penerbit Sinar Harapan.
- Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to write a systematic review of the literature. *Health Environments Research & Design Journal*, 11(1), 15–30. <https://doi.org/10.1177/1937586717747384>
- Perpustakaan Tanah Impian. (2012, October). *Perang Diponegoro 1825 s.d. 1830 M*. <https://perpustakaan.tanahimpian.web.id/2012/10/perang-diponegoro-1825-s-1830-m.html>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sari, D. P. (2023). *Konflik Agraria dalam Masa Kolonial dan Pemicu Perang Jawa*. Semarang: UNNES Press.
- Sari, N. M. (2023, August 7). *Kronologi sejarah Perang Diponegoro: Sebab, tokoh, akhir, dampak*. Tirto.id. <https://tirto.id/kronologi-sejarah-perang-diponegoro-sebab-tokoh-akhir-dampak-f9Zl>
- Shafira, A. (2022, April 25). *Perang Diponegoro sebagai bentuk pemberontakan terhadap kolonial Belanda*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/athayashafira2439/626683abbb44863f1431cd22/perang-diponegoro-sebagai-bentuk-pemberontakan-terhadap-kolonial-belanda>



- Shafira, R. (2022). *Selarong sebagai Basis Perlawanan Diponegoro: Kajian Geostrategis dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Skocpol, T. (1982). A causal model of civil strife. *American Political Science Review*, 76(3), 753–776. <https://doi.org/10.2307/1953907>
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Hanik, & Tatik. (2013). Perang Diponegoro (1825–1830) sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1–8. <https://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/151>
- Watts, S., et al. (2017). *Understanding conflict trends: A review of the social science literature on the causes of conflict*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2017). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Zahro, N. L., Subaryana, & Mardikun. (2021). Perang Diponegoro dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Jawa 1825–1830. *Rinontje Journal*, 3(2), 45–57. <https://jurnal.ipw.ac.id/index.php/rinontje/article/view/109>